

KEDUDUKAN JANDA TANPA MEMILIKI KETURUNAN DALAM PUTUSNYA PERKAWINAN JUJUR KARENA KEMATIAN PADA MASYARAKAT BATAK TOBA KRISTEN

CITRA BAKTI PANGARIBUAN

ABSTRACT

The right to wealth as inheritance of a husband that should be owned by a widow sometimes not hold to due a widow indeed someone from outside that once presented into husband kinship under marriage reasonable in relation. It is noted the existence of a widow without having any children against inheritance wealth of husband is not assured, so there is no legal surety and it is unfair to widow. In marriage by Christian of Batak Toba people, about the inheritance, the community hold honest marriage in which is highly decided by clanship paternally. The existence of a widow without any children for Batak Toba community in a honest marriage is not referred as heirs against the late husband but in judged of the late her-husband clanship, settled a widow as long as life is allowable with right to have daily necessity, so for the wealth inheritance of her husband could be just as source of daily economy to survive only.

Keywords : *Widow, Honest marriage, Christian Toba Batak Toba Community.*

I. Pendahuluan

Dalam masyarakat batak toba dikenal Sistem patrilineal yakni dengan perkawinan *jujur*, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus Ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.¹

Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal ini juga mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan. Kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal 23.

mewarisi, namun selaku istri turut memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan (harta perkawinan). Oleh sebab itu, janda pada masyarakat patrilineal ada suatu ketentuan, yaitu apabila janda diintegrasikan ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap disana dan mendapat nafkahnya. Akan tetapi, apabila janda tersebut memisahkan diri dari kerabat suaminya, janda tidak akan pernah membawa benda milik suaminya, seakan-akan ia mewarisinya.²

Perempuan di dalam perkawinan *jujur* pada masyarakat adat Batak Toba tidak mempunyai hak memiliki harta benda yang termasuk dalam harta perkawinan, hak tersebut hanya ada pada suami dan suami yang akan memberikan hak pakai atas harta benda tersebut kepada istrinya.

Konsekuensi ini berlanjut terus sampai suami meninggal dunia, istri yang telah menjadi janda tetap berkediaman di pihak suami dengan kewajiban mengurus harta peninggalan/warisan suami untuk diteruskan kepada ahli warisnya.

Hak pakai atas harta peninggalan/warisan suami ada-kalanya tidak dapat dinikmati oleh janda apabila pihak keluarga yang menjadi ahli waris dari mendiang suaminya mempunyai kepentingan untuk menjual atau melakukan transaksi atas harta peninggalan/warisan tersebut, karena janda hanya orang asing yang masuk dalam kekerabatan suaminya sebagai akibat adanya hubungan.

Dengan demikian kedudukan janda terhadap harta peninggalan/warisan suami tidak terjamin karena ada kemungkinan janda tidak mempunyai hak atas harta peninggalan/warisan suami, padahal di dalam hukum hak-hak dan kewajiban-kewajiban perorangan adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan maksudnya bahwa seorang istri dapat bertindak sendiri dalam bidang hukum tanpa bantuan atau pemberian kuasa oleh suaminya, istri dapat mengikatkan diri

² Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty*, Yogyakarta, 1981, Hal 166.

sendiri dalam suatu perjanjian hukum dan dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam persidangan pengadilan.³

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup perkawinan dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Prinsip ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada masyarakat adat Batak Toba.

Sehingga posisi janda tetap kritis jika dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan dari pihak kerabat mendiang suami maupun pihak-pihak lain, oleh karenanya diperlukan perlindungan hukum dalam arti pengakuan atas adanya hak-hak janda terhadap harta peninggalan/warisan suami untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi janda, khususnya apabila adanya gugatan dari janda terhadap kepentingan-kepentingan pihak lain yang ingin menguasai dan mengambil keuntungan dari harta peninggalan tersebut. Dari penjelasan diatas menjadi menarik untuk diteliti mengenai “Kedudukan Janda Tanpa Memiliki Keturunan Dalam Putusnya Perkawinan Jujur Karena Kematian Pada Masyarakat Batak Toba Kristen”.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diatas maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perkawinan dan pewarisan dalam perkawinan jujur pada masyarakat batak toba kristen ?
2. Bagaimana kedudukan janda dalam mewarisi harta perkawinan akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena kematian suami atau istri yang belum memiliki keturunan pada masyarakat Batak Toba Kristen ?

³ S.A. Hakim, *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan dan Pewarisan)*, Stensilan, Jakarta, 1983, Hal 1.

3. Bagaimana upaya penyelesaian pembagian harta perkawinan dalam putusnya perkawinan jujur karena kematian dan tidak memiliki keturunan ?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang :

1. Perkawinan dan Pewarisan dalam perkawinan jujur pada masyarakat batak toba kristen.
2. Kedudukan janda dalam mewarisi harta perkawinan akibat dari putusnya hubungan karena kematian suami atau istri yang belum memiliki keturunan pada masyarakat Batak Toba Kristen.
3. Upaya-upaya yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan pembagian harta perkawinan dalam putusnya perkawinan jujur karena kematian dan tidak memiliki keturunan.

II. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto bahwa :

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴

“Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hal 6.

pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat dipecahkan.⁵ Yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.⁶

Salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah, seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk penulisan ilmiah. Dimana data adalah merupakan gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti”.⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁸

Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*Law in the books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹

Menurut Johnny Ibrahim, oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal 13.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal 43.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran Penggunaan Perpustakaan di dalam penelitian Hukum*, PDHUI, Jakarta, 1979, Hal 1.

⁸ *Ibid*, Hal 13.

⁹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, Hal 127.

pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.¹⁰

Sumber data pada penelitian ini berupa bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*), peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, *Yurisprudensi*, kamus hukum dan *Ensiklopedia*, yang diuraikan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis. Data-data yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan metode *analisis kualitatif*.

Alasan penggunaan penelitian hukum normatif ini adalah pertama, didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan; kedua, data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir, ketiga, sifat dasar dari data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral (*holistic*), dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam (*Indepth information*).¹¹

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2007, Hal 295.

¹¹ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan Hukum pada majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003, Hal 1, Penelitian Doktrinal (*Doktrinal Research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law*

Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.¹²

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi yang berkaitan dengan kedudukan janda tanpa memiliki keturunan dalam putusnya perkawinan jujur karena kematian pada masyarakat Batak Toba Kristen.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini berupa Hukum, Kamus Indonesia – Batak, *Ensiklopedia* dan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif,¹³, yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan

as it written in the book, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*. Penelitian hukum normatif ini bersifat kualitatif.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal 86.

¹³ Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif-Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia – UI Press, Jakarta, 1992, Hal 15-20.

masalah yang dibahas, menelaah dan menilai bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, sehingga akhirnya dapat dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir secara deduktif yakni dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deskriptif.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Proses Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Kristen

Ada 3 (tiga) sistem pewarisan dalam Hukum Adat Batak, yaitu :

a. Sistem Pewarisan Individual

Pada keluarga-keluarga Patrilineal di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap harta warisan kepada masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu.

b. Sistem pewarisan mayorat laki-laki

Pada masyarakat suku Batak selain sistem pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang

menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.

c. Sistem pewarisan minorat laki-laki

Pada sebagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat diberik kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya.

Misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut.

Di dalam TAP MPRS NO 11/1960 huruf C dikatakan, bahwa terhadap semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan anak dan janda.

Mahkamah Agung di dalam Putusan MA No 179 K/SIP/1961 mempersamakan hak anak laki-laki dan perempuan serta janda di dalam hal warisan.

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing

Pengaruh pola berpikir orang yang semakin rasional mengakibatkan perubahan dalam Hukum Adat Batak Toba, yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Hal ini bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing dan pada waktu sebelum keluarnya TAP MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 harus tunduk pada sistem yang berlaku menurut hukum adat yaitu sistem kekerabatan/sistem kekeluargaan patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bisa bergerak/posisinya lemah.

Pada masyarakat patrilineal murni yang melakukan perkawinan jujur dimana istri masuk ke dalam keluarga suami maka apabila pewarisnya adalah laki-laki (suami) maka susunan kelompok keutamaannya adalah sebagai berikut :

1. Kelompok keutamaan I terdiri dari anak laki-laki dan keturunan yang laki-laki;
2. Kelompok keutamaan II terdiri dari ayah pewaris saja;
3. Kelompok keutamaan III terdiri dari saudara laki-laki beserta keturunan yang laki-laki;
4. Kelompok keutamaan IV terdiri dari kakek pewaris saja;
5. Kelompok Keutamaan V terdiri dari saudara laki-laki dari ayah beserta keturunan yang laki-laki.

Apabila pewarisnya adalah perempuan (istri) maka tidak ada kelompok keutamaan karena harta langsung dikuasai oleh suami tetapi apabila istri

meninggal sebagai janda dalam keluarga suami (suami telah meninggal lebih dulu) maka kelompok keutamaannya, sebagai berikut :

1. Kelompok keutamaan I terdiri dari anak laki dan keturunan yang laki-laki;
2. Kelompok Keutamaan II terdiri dari ayah mertua;
3. Kelompok keutamaan III terdiri dari ayah saudara laki-laki suami beserta keturunan yang laki-laki;
4. Kelompok keutamaan IV terdiri dari kakek suami;
5. Kelompok Keutamaan V terdiri dari saudara laki-laki dari ayah mertua peserta keturunan yang laki-laki.

Dengan demikian pada masyarakat patrilineal yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki dan apabila tidak mempunyai anak laki-laki maka dapat digantikan oleh anak perempuan sebagai laki-laki atau dengan pengangkatan anak laki-laki. Apabila tidak mengangkat anak maka warisan diteruskan kepada ayah yang masih hidup, apabila ayah sudah meninggal dunia maka digantikan oleh saudara laki-laki, apabila tidak ada saudara laki-laki maka tampil sebagai pengganti paman pewaris dan segala sesuatu ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat oleh para anggota keluarga yang keturunan laki-laki.

B. Kedudukan Janda Yang Belum Memiliki Keturunan Pada Masyarakat Batak Toba Kristen.

Kalau dulu menurut Raja Patik Tampubolon, seorang istri karena kematian suami, tidak berhak sebagai ahli waris harta suaminya. Anak laki-lakilah yang menjadi ahli waris ayahnya. Sebab si istri itu adalah mempunyai hak menumpang di rumah suaminya. Bahkan *pauseang* yang dibawanya dari orang tuanya adalah

hak menumpang pada harta suaminya. apakah nilai adat seperti ini masih kita pedomani ke depan ? menurut kami tidak lagi kita pedomani nilai adat seperti itu karena istri itu sudah menjadi satu dengan suaminya, yang disahkan secara adat, secara agama dan secara hukum negara. Maka si janda menurut kami dapat disebut sebagai ahli waris suaminya yang almarhum. Dengan catatan, si istri tersebut tetap berada di rumah suami almarhum atau tetap berada di tengah keluarga suami almarhum. Mengurusi anak-anaknya dan tidak menerima laki-laki lain sebagai suami barunya.¹⁴

Janda adalah pihak yang berpisah setelah adanya perkawinan sah baik pisah cerai hidup ataupun cerai karena kematian suaminya dan janda dapat mewaris ataupun tidak mewaris harta peninggalan/warisan sangat tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat.

Kematian seorang suami memunculkan keadaan yang bisa melahirkan segala jenis pertalian keluarga dan istri yang ditinggal suaminya (*na mabalu*).

Janda cerai karena kematian suami, memiliki dua pilihan, antara lain :

- a. Janda dapat tetap tinggal dibawah kuasa dan di dalam lingkaran kerabat almarhum suaminya serta tidak menikah lagi, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kejadian, yaitu :
 1. Kedudukan janda dengan ada anak baik anak laki-laki ataupun anak perempuan karena kematian suami pada masyarakat batak Toba Kristen terhadap harta peninggalan /warisan almarhum suami dalam perkawinan jujur menurut hukum waris adat batak bukan sebagai ahli waris dari almarhum suaminya walaupun dengan demikian janda mempunyai kedudukan yang terhormat dan istimewa karena janda memiliki peran ganda yaitu sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya, maksudnya selama janda hidup, maka ia mempunyai hak untuk

¹⁴ H.P. Panggabean, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian Utama, Jakarta, 2007, Hal 103.

menikmati/memakai dan mengelola/mengurus harta peninggalan/warisan almarhum suaminya untuk diteruskan pada anak-anaknya.

2. Kedudukan janda dengan tidak ada anak karena kematian suami pada masyarakat Batak Batak Toba Kristen terhadap harta peninggalan/warisan almarhum suami dalam perkawinan jujur menurut hukum waris adat batak bukan sebagai ahli waris dari almarhum suaminya namun dengan kebijakan dari kerabat almarhum suaminya, janda selama hidup berhak untuk mendapatkan/memperoleh biaya sandang pangan karena janda tidak bekerja sehingga harta peninggalan/warisan almarhum suaminya sebagai sumber ekonomi untuk dapat bertahan hidup dan janda juga diberi bekal untuk membuka usaha.

b. Janda dapat kembali ke kerabatnya (*parboru*)

Kembalinya janda kepada pihak kerabatnya (*parboru*) maka dilakukan pengakhiran pemisahan (*pasaehon*) yang dapat diatur dalam suasana persahabatan dan kekeluargaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan atau dengan campur tangan hakim yang akan diawali dengan penetapan jumlah pembayaran perkawinan yang harus dikembalikan oleh kerabat perempuan (*parboru*). Istilah ini disebut *mulak sian tangga toru*.¹⁵

Janda yang kembali ke kerabatnya (*parboru*), akibat kematian suaminya akan diberikan sejumlah barang-barang yang bernilai, dari harta peninggalan suaminya yang diberikan oleh keluarga almarhum suaminya. Namun ini tidak

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak P. Hutapea (opung Talenta) Sebagai Tokoh Adat Batak di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, Tanggal 02 Agustus 2015.

bersifat wajib hanya bersifat pemberian bila keluarga almarhum suaminya mau memberi.¹⁶

Janda yang ditinggal suami karena kematian, tidak memiliki anak maka janda tersebut melakukan pengembalian pembayaran perkawinan (*sinamot*) dan diimbangi dengan pengembalian hadiah perkawinan (*pauseang*), sedangkan apabila janda yang ditinggal suami karena kematian, memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan maka janda tersebut tidak dituntut untuk melakukan pengembalian pembayaran perkawinan (*sinamot*) dan harta peninggalan /warisan almarhum suaminya serta hadiah perkawinan (*pauseang*) berada dalam penguasaan janda maksudnya janda akan menangani harta peninggalan/warisan almarhum suaminya dan mengelola harta tersebut sampai anak-anaknya dewasa, penguasaan janda terhadap harta tersebut terbatas pada pengeluaran belanja sehari-hari dan pemeliharaan.

Campur tangan kerabat dekat dari almarhum suami (*uaris*) hanya sebatas menasehati dan memberikan peringatan kepada janda, apabila janda menggunakan harta peninggalan/warisan almarhum suaminya secara boros dan secara diam-diam janda memberikan barang-barang kepada kerabat dekat (*hula-hula*) dan memberikan keputusan atau jalan keluar dalam hal apabila janda berkeinginan menggadaikan atau menjual harta peninggalan/warisan almarhum suaminya (misalnya : tanah, rumah) dan mengawinkan anak perempuannya dan kerabat dekat dari almarhum suami (*uaris*) tidak boleh memberlakukan seorang janda dan anak-anaknya sesuka hati.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak L. Hutahaeen Sebagai Pasangan Janda/Duda Yang Putus Perkawinannya Karena Cerai Mati di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, Tanggal 03 Agustus 2015.

Pengaruh pola berpikir orang yang semakin rasional sehingga mengakibatkan perubahan dalam hukum adat batak toba, yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Yang bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing dan pada waktu sebelum keluarnya TAP MPRS Nomor II Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 harus tunduk pada sistem kekeluargaan patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan dalam hal ini janda di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bisa bergerak/posisinya lemah.

Perkembangan dalam kedudukan janda terjadi dengan keluarnya TAP MPRS Nomor II Tahun 1960, yaitu mengenai pembinaan hukum nasional dalam lampiran A Pasal 402, yaitu :¹⁷

- a) Diadakan usaha ke arah *homogeniteit* kesatuan dalam usaha mana harus diperhatikan kenyataan yang masih hidup.
- b) Asas dan pembinaan hukum nasional disesuaikan dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur.
- c) Terhadap semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan anak-anak dan janda.

Menurut Soetandyo Wignjo Soebroto, bahwa TAP MPRS Nomor II Tahun 1960 menyatakan setiap usaha untuk memperoleh kesatuan hukum harus memperhatikan benar-benar realitas yang ada di Indonesia dan bahwa asas-asas

¹⁷ Rehngana Purba, Sikap Mahkamah Agung Terhadap Kedudukan Duda dan Janda Dalam Hukum Adat, Kanun No 35, Edisi April, Jakarta, 2000.

yang dipakai untuk membentuk hukum nasional harus selalu bersesuaian dengan GBHN dan harus pula didasarkan pada hukum adat.¹⁸

Setelah keluarnya TAP MPRS Nomor II/1960, kemudian disusul dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961, yang sangat membawa perkembangan pada hukum waris khususnya terhadap kedudukan anak perempuan dan janda yang membawa pengaruh terhadap persamaan kedudukan perempuan pada umumnya dengan anak laki-laki yang kemudian juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan adanya TAP MPRS Nomor II Tahun 1960 dan putusan-putusan Mahkamah Agung yang merupakan Yurisprudensi yang fungsinya untuk menciptakan hukum yang baru dengan merubah hukum yang lama, dengan atas pertimbangan bahwa hukum yang lama itu tidak sesuai lagi dengan perasaan masyarakat dimana tempat hukum itu berlaku. Dengan perubahan tersebut menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat, sehingga janda memperoleh keadilan dan kepastian hukum sebagai ahli waris bilamana perkawinannya putus karena kematian.

C. Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Batak Toba Kristen

Perselisihan timbul oleh adanya gesekan yang tak terhindarkan diantara sesama kerabat yang hidup bersama dan yang dibuat bertambah parah oleh tidak adanya tata krama dalam pergaulan, serta kekasaran yang menjadi ciri masyarakat batak toba pada umumnya.

¹⁸ Soetandyo Wignjo Soebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 211.

Mereka tahu, tingkah laku yang menghina adalah sumber terjadinya percekocokan (*tois mula ni gona*) dan masih banyak hal lain yang menjadi penyebab mengapa percekocokan selalu membara di kalangan orang Batak Toba.

Bahwa dalam mencari jalan penyelesaian mengenai perselisihan pembagian harta perkawinan/warisan di kalangan orang Batak Toba sering menjadi sengketa. Pembagian harta peninggalan/warisan dan kedudukan mewaris janda pada umumnya menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai. Tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris, jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah melainkan yang dikehendaki adalah sengketa diselesaikan dengan damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun. Jalan penyelesaian mengenai perselisihan tersebut dapat ditempuh dengan cara :¹⁹

a. Negosiasi/Mediasi/Musyawarah secara adat

Apabila terjadi sengketa maka biasanya semua anggota keluarga pewaris (suami/ayah) almarhum berkumpul untuk menyelesaikan sengketa, pertemuan tersebut dipimpin oleh anak tertua laki-laki dari pewaris yang telah dewasa atau paman (saudara laki-laki pewaris) atau juru bicara yang ditunjuk dan disetujui bersama para anggota keluarga yang hadir. Di dalam negosiasi/mediasi/musyawarah tersebut, pimpinan pertemuan/juru bicara membuka pembicaraan dengan berbagai peribahasa dan ayat suci agama

¹⁹ Wawancara dengan Ibu T. Hutahean/br. Hutapea sebagai Tokoh Agama di Huria Kristen Batak Protestan di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, tanggal 03 Agustus 2015.

yang dipercayai peserta pertemuan, agar semua peserta pertemuan berpikir dan berbicara masalah dengan jujur; tenang; dan penuh toleransi, setelah itu dilanjutkan dengan mengemukakan masalah yang menjadi sengketa oleh peserta pertemuan namun dengan besarnya rasa malu antara yang satu dengan yang lain maka penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara rukun dan damai.

Hasil putusan melalui negosiasi/mediasi/musyawarah secara adat yang lebih lunak yaitu membiarkan harta perkawinan/warisan almarhum suaminya dikelola oleh janda, asal tidak menjadi hak milik, hal ini pada umumnya disetujui para ahli waris, sedangkan untuk putusan negosiasi/mediasi/musyawarah secara adat yang membatasi hak janda pada umumnya tidak ditaati sehingga menyebabkan peserta pertemuan tidak puas dengan hasil negosiasi/mediasi/musyawarah secara adat karena merasa dirugikan sehingga sengketa menjadi lebih besar dan rumit yang pada akhirnya dilanjutkan ke pengadilan negeri.

- b. Janda membawa sengketa ke pengadilan apabila adanya tekanan emosi dan penderitaan yang tidak tertahan serta bukan untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tetapi mencari jalan keadilan menurut perundang-undangan, jurisprudensi dan perasaan hakim. Keputusan pengadilan negara segala sesuatunya didasarkan pada kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Hasil putusan pengadilan negeri dapat diketahui bahwa hukum negara mengacu pada jurisprudensi yang telah ada pada waktu dulu yaitu pada Putusan

Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1959, Nomor 320K/Sip/1958, yang berbunyi : menurut hukum adat di daerah tapanuli pada perjalanan zaman sekarang istri dapat mewarisi harta pencaharian dari suaminya yang meninggal dunia dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 14 Juni 1968, Nomor 100 K/Sip/1967, yang berbunyi : mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju ke arah persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan pengakuan janda sebagai ahli waris. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka janda berhak atas separoh dari harta perkawinan sedangkan sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya masing-masing mendapat sepertiga bagian (di Daerah Kabanjahe).

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pembagian harta perkawinan dalam hal terjadinya perceraian karena kematian atas perkawinan yang tidak dicatatkan pada masyarakat batak toba kristen yang telah dibahas dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan dan Pewarisan pada masyarakat adat batak toba yang beragam kristen sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kelompok kekerabatannya. Masyarakat batak toba memiliki kelompok kekerabatan dengan garis keturunan patrilineal (garis keturunan yang berasal dari

laki-laki). Artinya posisi laki-laki sangat dominan baik dalam hal perkawinan maupun pewarisan/pembagian warisan.

2. Janda cerai karena kematian suami, memiliki dua pilihan terkait dengan kedudukannya, antara lain :

a. Janda dapat tetap tinggal dibawah kuasa dan di dalam lingkaran kerabat almarhum suaminya serta tidak menikah lagi, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kejadian, yaitu :

1) Kedudukan janda dengan ada anak baik anak laki-laki ataupun anak perempuan karena kematian suami pada masyarakat batak toba kristen terhadap harta peninggalan/warisan almarhum suami dalam perkawinan jujur menurut hukum waris adat batak bukan sebagai ahli waris dari almarhum suaminya walaupun dengan demikian janda mempunyai kedudukan yang terhormat dan istimewa karena janda memiliki peran ganda yaitu sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya, maksudnya selama janda hidup, maka ia mempunyai hak untuk menikmati/memakai dan mengelola/mengurus harta peninggalan/ warisan almarhum suaminya untuk diteruskan pada anak-anaknya.

2) Kedudukan janda dengan tidak ada anak karena kematian suami pada masyarakat Batak Toba Krsiten mengenai peninggalan/warisan almarhum suami dalam perkawinan jujur menurut hukum waris adat batak bukan sebagai ahli waris dari almarhum suaminya namun dengan kebijakan dari kerabat almarhum suaminya, janda selama hidup berhak untuk

mendapatkan/memperoleh biaya sandang pangan, sehingga harta peninggalan/warisan almarhum suaminya sebagai sumber ekonomi untuk dapat bertahan hidup dan janda juga diberi bekal untuk membuka usaha.

b. Janda dapat kembali ke kerabatnya (*parboru*)

Kembalinya janda kepada pihak kerabatnya (*parboru*) maka dilakukan pengakhiran pemisahan (*pasaehon*) yang dapat diatur dalam suasana persahabatan dan kekeluargaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan atau dengan campur tangan hakim yang akan diawali dengan penetapan jumlah pembayaran perkawinan yang harus dikembalikan oleh kerabat perempuan (*parboru*). Istilah ini disebut *mulak sian tangga toru*.

Namun dengan keluarnya TAP MPRS Nomor II Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 membawa perkembangan pada hukum waris khususnya terhadap kedudukan janda dimana janda sebagai ahli waris, serta membawa pengaruh terhadap persamaan kedudukan perempuan pada umumnya dengan anak laki-laki yang kemudian juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Penyelesaian perselisihan pembagian harta perkawinan di kalangan orang batak toba kristen pada umumnya menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai. Tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris, Jalan penyelesaian mengenai perselisihan tersebut dapat

ditempuh dengan cara Negosiasi/Mediasi/Musyawarah secara adat. Bilamana negosiasi/mediasi/ musyawarah secara adat tidak berhasil oleh karena salah satu pihak masih merasa dirugikan dari putusan tersebut, sehingga sengketa menjadi lebih besar dan rumit maka pada akhirnya perselisihan tersebut pada umumnya dilanjutkan ke pengadilan negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam hal tradisi/budaya perkawinan jujur pada masyarakat batak toba kristen harus tetap dilestarikan sebagai warisan budaya, namun mengenai pewarisan/pembagian warisan seharusnya tidak membedakan lagi antara laki-laki dan perempuan sebab anak laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan adalah sama. Zaman sekarang ini, peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat juga besar, untuk itu adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.
2. Melakukan sosialisasi mengenai adanya jurisprudensi yang dapat menjadi acuan untuk perlakuan yang adil terhadap perempuan (janda) dalam hal mewarisi. Dimana hak suami istri berkaitan dengan harta perkawinan masing-masing memiliki hak yang sama.
3. Bahwa kepada seluruh masyarakat Indonesia Khususnya dalam hal ini kepada masyarakat Batak Toba Kristen perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang berlaku. Akibat hukum dari

perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dalam hal pembagian harta bersama/harta perkawinan. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Hakim, S.A, *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan dan Pewarisan)*, Stensilan, Jakarta, 1983.

Hubberman, And Miles, *Analisis Data Kualitatif-Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia – UI Press, Jakarta, 1992.

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2007.

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Panggabean, H.P, *Kekristenan dan Adat Budaya Batak Dalam Perbincangan*, Dian Utama, Jakarta, 2001.

Purba, Rehngana, *Sikap Mahkamah Agung Terhadap Kedudukan Duda dan Janda Dalam Hukum Adat, Kanun No 35*, Edisi April, Jakarta, 2000.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 1983.

_____, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Wignjo Soebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional* , Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1994.

B. Makalah dan Jurnal

Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan Hukum pada majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003, Hal 1, Penelitian Doktrinal (*Doktrinal Research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*. Penelitian hukum normatif ini bersifat kualitatif.